



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 29 April 2025

Halaman: 2

STATUS RIBUAN PERMOHONAN MASIH 'MENGgantUNG'

Banyak Duplikasi, Izin PBG Jadi Atensi

YOGYA (KR) - Walikota Yogya Hasto Wardoyo memberikan atensi terhadap permohonan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Terutama atas temuan ribuan permohonan yang statusnya masih 'menggantung'. Mayoritas akibat duplikasi permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Menurut Hasto, ada sekitar 1.500 permohonan izin PBG di tahun 2024 yang belum selesai dalam sistem. Dalam seratus hari kerjanya sebagai wali kota, ia menargetkan adanya penyelesaian atas izin yang dulu bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu. "Kalau memang secara ketentuan tidak bisa diproses izinya, ya divonis tidak bisa. Jadi biar selesai dan tidak menggantung statusnya,"

ungkapnya, Senin (28/4).

Status menggantung atas permohonan izin PBG diakibatkan oleh kelengkapan persyaratan yang tak kunjung dipenuhi oleh pihak pemohon. Padahal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Yogya membuka layanan konsultasi perizinan dan investasi secara online maupun offline di Mal Pelayanan Publik (MPP)

Kompleks Balaikota.

Hasto mengaku, banyak layanan perizinan agak mundur penyelesaiannya karena komunikasi yang kurang bagus. Misalnya ada persyaratan yang masih kurang, namun pihak pemohon maupun instansi terkait justru saling menunggu. Oleh sebab itu dirinya meminta DPMPPTSP Kota Yogya yang mengampu MPP agar lebih proaktif memberitahu dan membina kepada pemohon perizinan yang berkali-kali gagal.

"Masyarakat juga setelah diberi tahu kekurangannya maka dia harus cepat memenuhi persyaratan. Kalau tidak tahu, ya tanya. Kadang-kadang masyarakat sudah diberi tahu tapi tidak segera melengkapi syaratnya. Yang gitu-

gitu jangan dibiarkan karena banyak izin itu untuk usaha. Jangan menunda tumpukan 'utang' kita kepada masyarakat," tandasnya.

Kepala DPMPPTSP Kota Yogya Budi Santosa, menjelaskan pihaknya sudah menelusuri banyaknya perizinan yang stagnan. Ternyata hal itu terhenti karena pemohon atau masyarakat tidak memenuhi syarat, kurang syarat dan bahkan tidak tahu. Layanan klinik konsultasi dan investasi yang berada di MPP Kota Yogya diharapkan mampu menjembatani persoalan tersebut.

Budi menambahkan sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah diterbitkan 1.858 izin PBG. Pengajuan perizinan PBG di-

lakukan melalui SIMBG Kementerian Pekerjaan Umum RI. Sebelum mengajukan izin di SIMBG, pemohon harus mengajukan permohonan PBG di DPMPPTSP karena ada berkas persyaratan yang harus dipenuhi.

"Kalau untuk rekomendasi teknis perizinan PBG ditangani Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya. Kami selalu berkoordinasi agar setiap permohonan dapat diproses sesuai ketentuan baik dari segi waktu maupun persyaratan," katanya.

Sementara Kepala Dinas PUPKP Kota Yogya Umi Akhsanti, menyampaikan sekitar 1.500 permohonan izin PBG yang belum selesai itu seluruhnya merujuk data

di SIMBG. Untuk itu pihaknya akan mencermati permohonan PBG yang belum selesai. Pasalnya, banyak permohonan PBG tidak bisa diteruskan antara lain akibat duplikasi atau permohonan ganda. Ini biasanya disebabkan saat permohonan awal ada kekurangan namun ketika melengkapi permohonan justru mendaftar dengan permohonan baru. "Memang banyak hal teknis yang ada di pemohon. Ada yang mengajukan PBG sementara bangunan sudah jadi, kami kembalikan untuk mengajukan SLF dulu. Ada juga permohonan kita kembalikan karena ada kekurangan, tapi sudah lebih dari satu bulan tidak juga melengkapi, sehingga statusnya masih menunggu," terangnya.

(Dh)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005